



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI NUR ALAM SYAH
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 277249

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 323 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.462.700.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.200.000
4. MOBIL, MINI COOPER CLUBMAN COOPER S Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.638.550.666

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.158.450.666

III. HUTANG Rp. 771.318.524

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.387.132.142

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.